

PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

Rony Widjanarko

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Budi Winarno

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

***Abstract.** Evaluation is an activity that is absolutely necessary in regional development. Various laws and regulations state that evaluation activities are activities that must be carried out by each region, for example evaluating the implementation of the RKPD or RPJMD. In addition, evaluations can also be carried out based on specific needs and goals.*

***Keywords:** evaluation, regulations, activities.*

Abstrak. Evaluasi merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah. Berbagai peraturan perundangan menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap daerah, misalnya evaluasi pelaksanaan RKPD atau RPJMD. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu.

Kata kunci: evaluasi, peraturan, kegiatan.

LATAR BELAKANG

Menurut Local Economic and Employment Development atau LEED (2009) evaluasi dalam terminologi ekonomi adalah penentuan perkembangan kemajuan dari kebijakan, program, atau proyek yang menyebabkan perubahan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan pembuatan kebijakan dan perencanaan. Evaluasi memungkinkan desain dan modifikasi kebijakan dan program yang dibuat dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengertian lain dari evaluasi diungkapkan oleh Chelimsky (1989) yaitu suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program. Wirawan (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Dari beberapa pengertian yang ada memberikan

Received Oktober 30, 2022; Revised November 2, 2022; Desember 14, 2022

* Rony Widjanarko

pengertian yang secara substantif sama, bahwa evaluasi merupakan cara yang dipergunakan untuk melihat bagaimana implementasi dari program atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, melalui suatu metode tertentu.

Menurut LEED (2009) evaluasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif (summative evaluation). Evaluasi formatif merupakan evaluasi terhadap suatu proses sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi terhadap dampak atau outcome. Evaluasi formatif berfokus pada bagaimana program dijalankan sedangkan evaluasi sumatif berfokus pada bagaimana hasil dari program tersebut.

Menurut LEED (2009) pengertian evaluasi berbeda dengan pengertian monitoring. Monitoring berkaitan dengan apa yang terjadi berdasarkan informasi yang dikumpulkan sementara evaluasi memberikan dasar dalam justifikasi dan keputusan antara “ya” dan “tidak”, misalnya hasil evaluasi menyimpulkan suatu program “tercapai” dan “tidak tercapai” atau “sesuai” dan “tidak sesuai”, dan sebagainya. Untuk itu dalam evaluasi dibutuhkan data yang reliable, akurat, dan mutakhir (LEED, 2009:11). Solihin (2012) membedakan monitoring dan evaluasi dari aspek: tujuan, fokus, cakupan, serta waktu pelaksanaan. Dalam hal tujuan misalnya, monitoring menilai kemajuan dalam pelaksanaan program sementara evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Dalam hal waktu, monitoring dilakukan secara terus menerus atau berkala selama pelaksanaan program sedangkan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program.

GAMBARAN UMUM KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA

Visi Dan Misi Kota Surakarta

Visi Kota Surakarta Tahun 2016–2021 adalah Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Penjabaran Visi Kota Budaya akan diterjemahkan dalam Misi. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap stakeholders selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.” Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Surakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh poisisi geografis Surakarta yang sangat strategis. Dalam RPJMD, sesuai RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Tingkat ketercapaian visi-misi dituangkan melalui berbagai indikator. Antara lain indikator perekonomian daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD. Indikator tersebut dipergunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja perekonomian.

Tema Pembangunan Kota Surakarta

Berdasarkan visi dan misi yang ada, tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2019 adalah “Pengembangan Daya Saing Kota didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Kearifan Budaya”, yang merupakan kelanjutan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, dengan menambahkan penekanan pada penguatan daya saing serta kemandirian masyarakat. Tema ini fokus pada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pemasaran keunggulan kota melalui aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk kota, dan peningkatan jumlah pengunjung luar kota yang beraktivitas di Kota Surakarta. Dampak lain yang diharapkan adalah penambahan jumlah variasi produk, jasa, dan event kota yang melibatkan pelaku dari luar daerah dan kemandirian masyarakat rentan dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan.

Program dan kegiatan pembangunan juga diprioritaskan pada hal yang berdampak menguatkan kearifan budaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menjaga keadilan antar golongan kelompok masyarakat, dan menguatkan kesiagaan masyarakat untuk antisipasi bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial). Program dan kegiatan tersebut disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Semua hal tersebut diintegrasikan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2019.

Evaluasi makroekonomi Kota Surakarta secara substantive tidak lepas dari evaluasi pelaksanaan RKPD karena makroekonomi merupakan salah satu aspek dalam dokumen RKPD. Sementara itu, dokumen RKPD idelanya juga berlandaskan pada dokumen RPJMD yang telah disusun. Hal ini mengingatkan bahwa RKPD pada dasarnya adalah tahapan dalam upaya pencapaian RPJMD.

Dengan demikian, evaluasi aspek makroekonomi bukanlah evaluasi RKPD secara keseluruhan mengingat luasnya cakupan RKPD. Evaluasi makroekonomi lebih

difokuskan pada kinerja perekonomian secara makro yang telah dilaksanakan dan berhasil dicapai.

KONSEP DAN METODE KAJIAN

Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di daerah, secara internal penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kekuatan (potensi) atau kelemahan. Penduduk akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan di daerah apabila penduduk di daerah tersebut mampu berperan secara aktif sebagai subyek pembangunan daerah. Untuk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, penduduk haruslah memiliki kriteria minimal sebagai berikut: pertama, penduduk memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai besar penduduk. Hasil studi empiris yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam kemajuan atau pembangunan daerah. Kedua, penduduk memiliki rasio ketergantungan yang kecil, artinya struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua atau manula) dapat menghambat progresivitas pembangunan daerah. Ketiga, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong semakin besarnya beban rumah tangga melalui tingginya tingkat konsumsi terutama makanan. Hal ini akan menjadikan lambatnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi daerah untuk merumuskan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan 'bottom-up planning'. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih pemeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan 'bottom-up'

berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Pendekatan bottom-up mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal

Masalah kependudukan yang seringkali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersediannya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas

dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumberdaya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (forward dan backward linkage).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah “..the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sektor partners to create better conditions for economic growth and employment generation.”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarakat dan pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, seperti Ravallion dan Chen (1997)¹ serta Adam (2002)². Penelitian lain seperti Lin di China (2008)³ dan HBhanumurthy dan HMitra (2004)⁴ di India juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan sendiri dikenal dalam dua bentuk, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. BPS memberikan pengertian bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum

kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkanakan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Perekonomian Kota Surakarta

A. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Surakarta pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 trilyun dan pada tahun 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp48 trilyun. Kenaikan terbesar dari 2010 ke 2019 adalah sektor jasa pendidikan dari Rp785 milyar menjadi Rp2,6 trilyun atau naik sebesar 236,45%. Peringkat kedua adalah sektor jasa perusahaan yang naik sebesar 203,75% dan yang ketiga adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 192,19%. Sektor yang memiliki kenaikan terkecil dari 2010 ke 2019 adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan kenaikan sebesar 32,89%.

Apabila dihitung dari periode RPJMD 2016-2021, selama periode RPJMD tersebut yaitu 2016-2019 sektor yang memiliki kenaikan terbesar adaah sektor informasi dan komunikasi yang mengalami kenaikan sebesar 46,09% dan yang kedua adalah sektor jasa perusahaan sebesar 34,52%.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB riil dan bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, akan menghasilkan informasi PDRB perkapita riil. Sementara itu PDRB atas dasar harga berlaku apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan PDRB Perkapita nominal. Jumlah penduduk didasarkan pada data BPS Kota Surakarta. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan pendapatan per orang per tahun. Pada tabel 4.4, berdasarkan perhitungan PDRB ADHK dan ADHB, selama 2010-2019 PDRB perkapita Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus meningkat. Tahun 2019 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp92,3 juta dan ADHK sebesar Rp68,2 juta. Pada tabel 4.5, secara nominal, PDRB perkapita tahun 2019 naik sebesar 7,69% sementara secara riil naik sebesar 5,43%. Kenaikan tiap tahun PDRB perkapita sepanjang 2010-2019 terlihat berfluktuasi. Kenaikan yang terjadi di tahun 2019 sendiri lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2018.

Bila data jumlah penduduk bersumber dari Disdukcapil, pada tabel 4.6, terlihat adanya perbedaan nilai PDRB perkapita. Tahun 2019 misalnya, perhitungan PDRB perkapita ADHB berdasarkan data kependudukan dari Disdukcapil adalah Rp83,4 juta jauh lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya. Untuk PDRB perkapita ADHK tahun 2019 tercatat Rp61,6 juta dengan selisih tidak sebesar perhitungan menggunakan ADHB.

Kinerja PDRB perkapita Kota Surakarta juga dapat dilihat perbandingannya dengan wilayah lain. Untuk membandingkan dengan wilayah lain, data yang dipergunakan adalah data dari BPS agar “comparable”. Dapat dilihat pada tabel 4.7, berdasarkan data perbandingan tersebut, Kota Surakarta memiliki PDRB perkapita riil yang jauh di atas rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, dan nasional bahkan bila Kota Surakarta menggunakan data kependudukan dari Disdukcapil sekalipun. Tingginya PDRB perkapita riil Surakarta ini disebabkan karena Surakarta mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun tetap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan penduduk Surakarta per tahun selama 2010-2019 hanya sebesar 0,42% sementara untuk provinsi Jawa Tengah adalah 0,76% dan di tingkat nasional adalah 1,26%.

C. Inflasi

Sepanjang 2010-2019 inflasi di Surakarta terlihat berfluktuasi. Selama periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai hanya 1,93% dan yang tertinggi adalah tahun 2013 yang mencapai 8,32%. Penurunan inflasi yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu dari 8,01% di tahun 2014 menjadi 2,56% di tahun 2015. Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,94% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 2,45%.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2010-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 9,08% di tahun 2018 dan di tahun 2019 tingkat kemiskinan kembali turun 8,70%. Penurunan tingkat kemiskinan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena kenaikan jumlah penduduk diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 mencapai 45.200 dan angka ini turun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 46.990. Penurunan tingkat kemiskinan di sisi lain juga diikuti oleh kenaikan garis kemiskinan selama 2010-2019. Pada tahun 2019 garis kemiskinan Kota Surakarta mencapai Rp473.516 per kapita per bulan.

Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2019 Kota Surakarta memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,60 sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,48. Dengan demikian, penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi di tahun 2019 belum diikuti oleh perbaikan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, sehingga meski tingkat kemiskinan turun namun tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

E. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 286.811 dengan jumlah pengangguran sebanyak 12.003. Dengan demikian tingkat pengangguran Kota Surakarta tahun 2019 mencapai 4,18%, menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,39%. Meski jumlah pengangguran sedikit mengalami kenaikan di tahun 2019,

namun tingkat pengangguran (perbandingan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja) justru menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan angkatan kerja yang lebih banyak dibandingkan peningkatan jumlah pengangguran. Tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama 2010-2019 menunjukkan tren peningkatan. Hanya di tahun 2012-2013 tingkat kesempatan kerja mengalami penurunan (tingkat pengangguran mengalami kenaikan).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Secara umum, kinerja perekonomian Kota Surakarta bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah cukup bagus. Beberapa indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita riil, garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran, menunjukkan kinerja perekonomian Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas.
2. Permasalahan perekonomian Kota Surakarta adalah angka ketimpangan distribusi pendapatan yang menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari nilai indeks Gini maupun pengukuran menggunakan indeks Williamson. Meskipun beberapa kasus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta memiliki relevansi dengan tingkat ketimpangan, namun hal ini tidak terjadi di Kota Surakarta berdasarkan pengukuran nilai koefisien korelasi. Dengan demikian, permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surakarta tidak berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, namun oleh faktor lain.
3. Korelasi antara nilai indeks Williamson dengan indeks Theil di masing-masing kecamatan menunjukkan adanya korelasi negative dengan nilai yang sangat kecil sehingga permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masing-masing kecamatan tidak berkaitan dengan konsentrasi kemiskinan sehingga ketimpangan dan konsentrasi kemiskinan merupakan dua permasalahan yang berbeda. Hal ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan perekonomian Kota Surakarta.

Rekomendasi

Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2019). Surakarta Dalam Angka. Diakses dari <https://surakartakota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2019). Jawa Tengah Dalam Angka. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indonesia Dalam Angka. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>